

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)

e-ISSN : 2502-8537 (Online)

KESENJANGAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DI INDONESIA PADA MASA DARURAT COVID-19: TELAAH DEMOGRAFI ATAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BELAJAR DARI RUMAH

(INEQUALITY OF EDUCATION SERVICES IN INDONESIA DURING THE EMERGENCY PHASE OF COVID-19: DEMOGRAPHIC ANALYSIS OF IMPLEMENTATING HOME LEARNING POLICY)

Indah Pratiwi^{1*}, Bakti Utama²

¹Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

²Alumni Pascasarjana Antropologi Universitas Gajah Mada

*Korespondensi penulis: ip_indah87@yahoo.com

Abstract

One of the effects of the COVID-19 pandemic on the education sector in Indonesia is the closure of schools. To ensure education services continue, the government issued a policy of learning home (Belajar dari Rumah/BDR) through online/distance learning. This paper aims to describe the implementation of the BDR for learning quality. To that aim, we have conducted telephone interviews with school principals and teachers from frontier, outermost and remote regions (3T) and non-3T regions. By looking at demographics perspective, implementation of BDR has six variations are a) learning by interactive virtual classroom b) learning assignment by social media c) learning in teacher's or student's home d) learning by using TV/radio e) learning by 'mouth-to-mouth' messages and f) learning stopped. The variations generate different quality of learning and will produce an increasing education inequality in Indonesia.

Keywords: home learning, COVID-19, education inequality, education emergency, online learning.

Sejak pasien COVID-19 pertama terdeteksi di Indonesia pada 2 Maret 2020, perhatian terhadap masalah penyebaran pandemi semakin menguat (Portal Informasi Indonesia, 2020). Sejumlah studi segera dilakukan untuk mengetahui kemungkinan dampak penyebaran COVID-19 (Suryahadi dkk., 2020., Revindo dkk., 2020). Untuk menghadapi kemungkinan dampak tersebut, berbagai kebijakan dikeluarkan pemerintah. Di sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bergerak cepat dengan mengeluarkan kebijakan belajar dari rumah (BDR) melalui Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam

Masa Darurat Penyebaran COVID-19 (Kemendikbud, 2020).

Tulisan singkat ini berupaya melihat kemungkinan implikasi kebijakan BDR pada masa darurat COVID-19. Terdapat dua hal yang menjadi titik tolak tulisan ini. *Pertama*, sebagaimana disebutkan Afriansyah, akses menjadi kata kunci dalam pembelajaran daring (Afriansyah, 2020). Menurut Afriansyah, terdapat tiga variabel yang memengaruhi keberhasilan pembelajaran daring, yaitu: umur, akses terhadap komputer dan internet, serta kesenjangan digital. *Kedua*, ketika kebijakan BDR ini dilakukan, kondisi infrastruktur

pendukung pembelajaran daring di Indonesia belum merata. Statistik pendidikan Indonesia menunjukkan hanya 46,33 persen sekolah yang memiliki jaringan internet (Solihin dkk., 2018). Artinya, masih banyak sekolah yang selama ini belum terpapar dan terbiasa menggunakan teknologi ini. Cakupan layanan sinyal kuat yang hanya menjangkau 66,22 persen wilayah Indonesia, serta kemampuan menggunakan perangkat digital yang hanya 28,43 persen (BPS, 2018) juga menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan ini. Dengan kondisi ini, kebijakan BDR diimplementasikan oleh sekolah dengan beragam cara.

Dengan menyandingkan temuan Afriansyah (2020) dan karakteristik ragam implementasi kebijakan BDR tersebut, kami melihat bahwa meskipun upaya responsif Kemendikbud patut diapresiasi, namun kebijakan ini juga memiliki potensi untuk memperlebar kesenjangan kualitas pembelajaran di Indonesia. Untuk membangun argumentasi ini, kami menggunakan perspektif demografi (Thomas, 2018), yaitu melihat atribut demografi yang melekat pada guru dan siswa untuk menelaah implementasi dan implikasi kebijakan BDR.

Secara umum kebijakan BDR sudah terlaksana di semua jenjang sekolah formal di Indonesia, namun implementasi kebijakan tersebut cukup bervariasi. Kami telah mewawancarai sejumlah kepala sekolah dan guru melalui telepon baik yang berasal dari wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) maupun non-3T. Hasilnya, kami menemukan enam variasi implementasi kebijakan BDR. *Pertama*, di wilayah dengan akses internet dan perangkat digital yang memadai serta didukung oleh guru dan siswa yang terampil menggunakan perangkat digital, adaptasi proses belajar dari rumah dapat berjalan dengan baik. Proses pembelajaran biasanya dilakukan melalui kelas di ruang maya (*interactive virtual classroom*) dan mengoptimalkan aplikasi belajar daring (*online classroom*).

Kedua, di sekolah-sekolah dengan akses internet dan perangkat digital yang memadai namun tidak didukung dengan keterampilan digital guru/siswa, BDR hanya dapat dilakukan secara terbatas. Proses pembelajaran berupa penugasan dan pembimbingan oleh guru umumnya dilakukan melalui aplikasi media sosial *WhatsApp*.

Ketiga, beberapa sekolah di kawasan 3T yang guru/siswanya tidak terjangkau internet memindahkan proses belajar dari sekolah ke rumah guru ataupun siswa. Agustina Arloy guru SD Kristen Rebi dari Kepulauan Aru, Maluku mengatakan: “*Di sini tidak ada jaringan listrik, Ibu. Saya numpang isi (charg) HP di kampung sebelah, setiap hari sa suruh siswa belajar ke rumah*”. Dengan kondisi serba terbatas ini, pembelajaran pada akhirnya dilakukan di rumah guru.

Keempat, beberapa sekolah yang juga tanpa jaringan internet melaksanakan BDR hanya dengan memanfaatkan TV/radio untuk menyebarkan penugasan dari guru misalnya di Kabupaten Wamena. Pembelajaran dari TV sebetulnya merupakan bagian dari upaya Kemendikbud dalam mengurangi kesenjangan kualitas belajar selama BDR. Namun hasil wawancara kami menunjukkan hanya sedikit wilayah tertinggal yang dapat menikmati program tersebut karena ketersediaan jaringan listrik yang tidak memadai, rendahnya daya jangkau program serta faktor kemiskinan. Untuk menyiasati keterbatasan akses sebagian guru menggunakan varian kelima yaitu mengandalkan “pesan berantai” (*‘mouth to mouth’ massage*). Aktivitas belajar seperti ini biasanya digunakan hanya sebatas mengumpulkan/menyampaikan tugas kepada siswa. Praktik semacam ini ditemukan di Kabupaten Halamahera Timur dan sebagian wilayah Papua. *Terakhir*, terdapat juga beberapa sekolah yang menjalankan kebijakan BDR dengan meliburkan sepenuhnya tanpa pembelajaran. Kondisi semacam ini terjadi karena tempat tinggal siswa menyebar dan kondisi geografis yang sulit dijangkau misalnya di Kapuas Hulu Kalimantan Barat. Selain itu, peran anak sebagai faktor produksi dalam ekonomi rumah tangga turut menjadi tantangan BDR di masa pandemi (Utama dkk., 2018).

Keragaman implementasi kebijakan belajar dari rumah ini tentu saja berpengaruh pada kualitas pembelajaran. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menilai bahwa setidaknya terdapat tiga kriteria yang menentukan kualitas pembelajaran jarak jauh. *Pertama*, kurikulum yang mendukung siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Dalam hal ini implementasi kurikulum pembelajaran jarak jauh sangat ditentukan oleh adanya modul/pelajaran dan interaksi guru-siswa yang

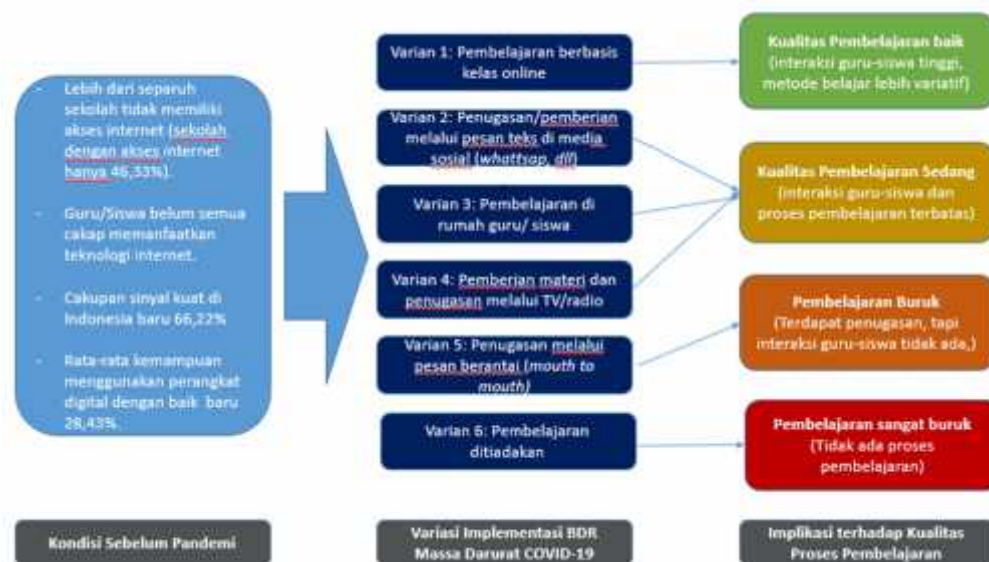
memadai untuk memastikan setiap siswa mendapat informasi secara utuh. *Kedua*, kesiapan SDM profesional yang mendukung siswa dan guru untuk mendayagunakan keterampilan jarak jauh. *Ketiga*, perangkat atau alat yang digunakan oleh siswa/guru dalam mengakses konten pendidikan termasuk alat komunikasi dan media ajar (Reimers dkk., 2020).

Berdasarkan tiga kriteria OECD di atas, kami menilai bahwa proses pembelajaran yang paling efektif selama kebijakan BDR dilaksanakan terjadi pada varian pertama. Hal ini ditandai dengan kesiapan perangkat dan kemampuan guru-siswa dalam memanfaatkan teknologi digital. Dengan kedua hal itu, guru dapat menyiapkan materi lebih optimal serta memiliki ruang interaksi untuk menyampaikan materi tersebut dengan lebih leluasa. Kualitas proses pembelajaran di bawahnya adalah varian kedua hingga keempat. Pada varian kedua, meskipun perangkat guru-siswa tampak siap namun tanpa kemampuan mengoptimalkan media digital yang memadai, ruang penyampaian materi pembelajaran menjadi terbatas. Pada varian ketiga, meskipun transfer pengetahuan tetap terjadi, namun keterbatasan perangkat pembelajaran membuat

proses pembelajaran tidak optimal. Selain itu, di masa pandemi pembelajaran secara langsung sangat berisiko bagi keselamatan guru-siswa.

Selanjutnya, pada pembelajaran TV/radio meskipun kurikulum tersedia dan transfer pengetahuan bisa saja terjadi, namun guru tidak dapat memastikan bahwa siswa menerima informasi dengan benar. Varian kelima yaitu “penugasan melalui pesan berantai” dapat dikatakan menghadirkan proses pembelajaran yang buruk karena pembelajaran hanya dilakukan melalui distribusi soal ke siswa/warga kemudian akan disampaikan ke siswa lainnya. Terakhir, kondisi yang paling buruk tentu saja adalah ketika proses pembelajaran dihentikan sebagaimana varian keenam. Peningkatan di atas menunjukkan bahwa hanya sekolah-sekolah yang mampu mengoptimalkan teknologi digital yang dapat menyelenggarakan pembelajaran lebih efektif pada masa darurat pandemi ini. Ilustrasi dari keragaman implementasi kebijakan bdr di tingkat sekolah dan implikasinya terhadap kualitas proses pembelajaran dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Keragaman Implementasi Kebijakan BDR di Tingkat Sekolah dan Implikasinya Terhadap Kualitas Proses Pembelajaran



Setidaknya terdapat tiga hambatan yang menyebabkan kesenjangan ini bisa terjadi. *Pertama*, akses terhadap teknologi internet di Indonesia belum merata. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan pemerataan jangkauan seluler layanan

jaringan 3G dan 4G sampai saat ini baru berada di angka 76 persen (Kominfo, 2020). *Kedua*, keterbatasan kepemilikan perangkat digital. Pada masyarakat miskin perangkat digital merupakan barang mewah. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)

menunjukkan penetrasi pengguna internet di Indonesia hanya diangka 68 persen dengan konsentrasi di wilayah perkotaan (APJII, 2019). Hal ini juga terkait dengan hambatan ketiga yaitu tingkat penguasaan dalam memanfaatkan teknologi digital masih timpang. Dalam hal ini, karakteristik usia menjadi aspek penting. Hasil temuan APJII menunjukkan pengguna internet yang berusia di atas 45 tahun cenderung mengalami kesulitan dalam memanfaatkan teknologi digital. Hal ini juga terjadi dalam dunia pendidikan, guru yang berusia 45 tahun ke atas kurang dapat mengoptimalkan media daring dibanding kategori usia di bawahnya (APJII, 2019). Sementara pada sisi peserta didik, siswa pada usia pendidikan dasar relatif lebih sulit memanfaatkan teknologi (karena membutuhkan pendampingan orang tua) dibanding siswa pada usia di atasnya.

KESIMPULAN

Kebijakan BDR oleh Kemendikbud selayaknya ditempatkan sebagai kebijakan mitigasi bencana di tengah penyebaran pandemi COVID-19. Artinya, pertimbangan untuk menyelamatkan nyawa menjadi yang terpenting. Meskipun demikian, pemenuhan hak pendidikan berkualitas bagi anak tidak bisa diabaikan. Dengan melihat keragaman implementasi BDR, semakin lama kebijakan ini dilakukan, kesenjangan kualitas belajar siswa akan semakin tinggi. Untuk itu berbagai upaya perlu dilakukan. Dalam jangka pendek, Kemendikbud perlu membuka kemungkinan alternatif metode pembelajaran dari rumah misalnya melalui kerjasama dengan radio komunitas, radio swasta, taman bacaan masyarakat, perpustakaan desa, dan penggerak literasi. Sementara dalam jangka panjang, penguatan kemampuan digital bagi guru dan pemerataan fasilitas teknologi informasi (TI) di seluruh wilayah Indonesia perlu dilakukan secara simultan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, A. (2020). *Covid-19, Transformasi Pendidikan dan Berbagai Problemnya*. <https://kependudukan.lipi.go.id/id/berita/53-mencatatcovid19/838-covid-19-transformasi-pendidikan-dan-berbagai-problemnya>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia [APJII]. (2019). *Laporan Hasil Survei Penetrasi Pengguna Internet Indonesia 2019*. <https://apjii.or.id/survei2018s/kirimlink>
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2018). Statistik Telekomunikasi Indonesia. Badan Pusat Statistik
- Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. [kominfo] (2019, April). *Refarming Buka Peluang Layanan 4G Lebih Merata*. SIARAN PERS NO. 74/HM/KOMINFO/04/2019
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan [Kemendikbud]. (2020, Maret). *Mendikbud Terbitkan SE tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat COVID-19*. <https://www.kemendikbud.go.id/main/blog/2020/03/mendikbud-terbitkan-se-tentang-pelaksanaan-pendidikan-dalam-masa-darurat-covid19>
- Reimers, F., Schleicher, A., Saavedra, J., & Touminen, S. (2020). *Supporting Continuation of Teaching and Learning during the COVID-19 Pandemic*. OECD <http://www.oecd.org/education/Supporting-the-continuation-of-teaching-and-learning-during-the-COVID-19-pandemic.pdf>
- Revindo, M.D., Sabrina, S., & Sowwam, M. (2020, April). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pariwisata Indonesia: Tantangan, Outlook, dan Respon Kebijakan. *Briefing note*. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. <https://www.lpem.org/id/briefing-note-april-2020-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-pariwisata-indonesia-tantangan-outlook-dan-respon-kebijakan/>
- Portal Informasi Indonesia .(2020, Maret 2). *Covid-19 Pertama, Masyarakat Jangan Panik*. <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik>
- Solihin, L., Utama, B., & Pratiwi, I. (2018). Indeks Aktivitas Literasi Membaca 2018 Laporan Penelitian Peningkatan Literasi Melalui Instrumen Indeks Literasi Nasional. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang, Kemendikbud.
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadama, D. (2020, April). *The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia..* SMERU

Working Paper.
http://smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp_covid19impact_draft.pdf

Thomas, R.K.(2018). *Concept, Methods and Practical Application in Applied Demography An Introductory Textbook*. Springer.
<https://doi.org/10.1007/978-3-319-65439-3>

Utama, B., Pratiwi,I., Atmadiredja, G., & Nurahmah, D. (2017). *Laporan Penelitian Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar*. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan.

